



RINGKASAN

HENING FITRI MULIA. Peran Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam Kegiatan Monitoring Pemberitaan Media. *The Role of The Public Communication The Ministry of Public Works and Housing Monitoring Media Reporting Activities*. Dibimbing oleh AMIRUDDIN SALEH.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh instansi. Kementerian PUPR dibantu oleh Biro Komunikasi Publik. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi bagi publik serta menjaga citra dan reputasi Kementerian di mata masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi publik memicu munculnya berbagai pemberitaan media. Pemberitaan media harus diiringi dengan pengawasan terhadap informasi yang berkembang. Pengawasan terhadap pemberitaan media biasa disebut dengan monitoring pemberitaan media.

Tujuan Laporan Akhir adalah menjelaskan proses *monitoring* pemberitaan media, menguraikan peran Biro Komunikasi Publik dalam kegiatan *monitoring* terhadap pemberitaan media, serta menguraikan hambatan dan solusi yang dihadapi ketika melakukan kegiatan *monitoring* terhadap pemberitaan media. Dalam melaksanakan kegiatan *monitoring* terdapat tiga tahapan yaitu perolehan data dari hasil kerjasama dengan lembaga penyedia jasa *monitoring* dan *monitoring* manual terhadap website dan media sosial milik Kementerian PUPR. Analisis dan pengolahan data yaitu proses pengolahan data mentah menjadi data yang sudah siap digunakan untuk proses penyajian laporan, kegiatan *monitoring* pemberitaan media menyediakan laporan dalam satuan harian, mingguan dan bulanan. Biro Komunikasi Publik memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan *monitoring* pemberitaan media yaitu sebagai penyedia data untuk evaluasi.

Data hasil kegiatan *monitoring* berisi analisis terhadap pemberitaan yang tersebar di berbagai media sehingga data tersebut berguna sebagai bahan evaluasi bagi Biro Komunikasi Publik yang menjalankan tugas sebagai humas Kementerian PUPR. Selain itu, kegiatan *monitoring* juga dapat di gunakan sebagai upaya mempertahankan citra instansi di mata publik. *Monitoring* pemberitaan media sebagai peringatan dini bagi instansi jika terdapat pemberitaan negatif yang mampu merusak citra instansi di masyarakat, sehingga instansi dapat mengantisipasi jika terjadi isu berkembang yang membahayakan. Biro Komunikasi Publik memiliki hambatan dalam melakukan kegiatan *monitoring* pemberitaan media yaitu hambatan komunikasi yang terbagi menjadi hambatan teknis, semantik dan manusiawi dan hambatan tersebut memiliki solusi sehingga dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci: kehumasan, Kementerian PUPR, *monitoring* pemberitaan media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University